

DEMOKRATISASI SEBAGAI SALAH SATU ASPEK DARI IMPLIKASI GLOBALISASI

(Mulia Nata Saputra. S.H. M.Si)

Abstract

Globalization, which is energized by the development of information and communication technology, creates an international system which is more open, including the domestic political system. This change is characterized by the emergence of non-state actors, together with the emergence of individual awareness on the problems of economy, politics and society pluralism which consequently develops democratization and political transparency. The success of economic development cannot be separated with the democracy development. One problem of democracy development is that there is still different perception between the supra-structure and infra-structure. In the level of supra-structure, democracy tend to go toward representative political institutions and the state power which tend to go toward society pluralism and freedom to unite and to form groups which are free from the government control, which is in turn will from the civil society. In this context, political education is very important in increasing the awareness of people's political rights. The government failure in mailing its policies and handling the pro-democracy movement in Indonesia will create new alternatives for those who are available inside the country. This happens because of the existence of global interactions which are more and more intensive as well as the existence of international linkage

Kata kunci : Globalisasi, ekonomi, politik

1. PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa pengaruh mendasar, baik dalam hubungan internasional maupun politik ekonomi domestik negara-negara di dunia. Perubahan ini ditandai munculnya aktor-aktor non-state dan keterkaitan yang kompleks antara isu-isu ekonomi dan politik. Globalisasi yang digerakkan oleh hubungan ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif, membentuk sistem internasional yang semakin terbuka dengan berbagai konsekuensi bagi sistem politik dan ekonomi kemudian berkembang menjadi isu sentral yang dihadapi Indonesia

Dengan adanya globalisasi, negara tidak lagi merupakan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional dan politik domestik, keterkaitan masalah ekonomi dan politik internasional tidak dapat sepenuhnya dikontrol oleh negara dan munculnya kombinasi kekuatan ekonomi dan teknologi sebagai fenomena globalisasi.

Globalisasi melahirkan 3 hal mendasar, yakni :

1. Keterkaitan ekonomi, politik, budaya dan afiliasi kelompok. Hal ini telah mengurangi kemampuan kontrol negara atas unit-unit di bawahnya, baik individu maupun kelompok.
2. Keputusan-keputusan nasional tidak lagi menjadi dominan politik domestik tapi terkait dengan hubungan antar negara dan individu dalam internasional.
3. Pembentukan identitas dan kesadaran politik dan budaya baru yang membuat mereka mempertanyakan eksistensi negara sebagai entitas tertinggi yang mampu memenuhi kepentingan-kepentingan mereka. Masalah ini menyangkut masalah kedaulatan dan loyalitas negara.

Inti dari ke - 3 perubahan di atas adalah lahirnya kesadaran individu tentang masalah masalah ekonomi, politik dan pluralisme masyarakat. Ini membawa konsekuensi tentang perlunya demokratisasi dan keterbukaan politik. Mengapa perlu demokratisasi dan keterbukaan sistem ekonomi dan politik ? Bukankah beberapa negara seperti Singapura, Taiwan dan Korea Selatan tidak tergantung dari keberhasilan demokratisasi ? Bukankah ini menunjukkan ada perbedaan antara perspektif Timur dan Barat dalam hal demokratisasi ?

II. PARADIGMA PEMBANGUNAN ORDE BARU

Pandangan-pandangan di atas, (meskipun secara eksplisit tidak pernah dinyatakan sebagai kebijakan pemerintah) telah menjadi paradigma pembangunan Orde Baru yang menekankan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dua hal itu telah berubah menjadi semacam dogma di hampir semua kehidupan ekonomi dan politik. Mulai dari pengusuran tanah, pembangunan pabrik, pembukaan lahan baru untuk investasi, pembatasan kegiatan politik mahasiswa, pemuda dan buruh, "pembinaan" partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan melalui undang-undang dan sebagainya, selalu dihadapkan pada kepentingan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Birokrasi dan jajaran pemerintahan menjadi alergi terhadap kegiatan politik rakyat sebab mereka harus mampu meraih tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas nasional sebagai sumber legitimasi pemerintah.

Selain itu, pandangan ini juga cenderung melahirkan praktek kolusi bisnis politik antara penguasa dan pengusaha yang dapat mengekang demokratisasi. Pembangunan ekonomi sebagai sumber legitimasi pada akhirnya selalu menciptakan cantolan kelompok-kelompok bisnis perkotaan pada pusat-pusat kekuasaan. Sementara itu kepentingan-kepentingan kelompok bisnis itu harus dilindungi oleh pemerintah karena mereka menjadi tenaga penggerak pembangunan ekonomi. Dan untuk itu demokratisasi yang dapat mengancam kepentingan ekonomi mereka harus dicegah dengan mengesampingkan aspirasi politik rakyat. Karena keterkaitan ekonomi politik seperti itu, sulit

diharapkan kelas menengah Indonesia yang sebagian besar adalah kelompok pemilik modal, dapat menjadi kekuatan pembaharuan politik di Indonesia.

III. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN DEMOKRATISASI

Dalam perspektif yang lebih luas pandangan bahwa pembangunan ekonomi dapat dilakukan tanpa demokratisasi politik adalah sangat menyesatkan dan ahistoris. Memang tidak semua keberhasilan pembangunan ekonomi pasar menganut sistem politik demokratis. Tapi tidak dapat dibantah bahwa semua sistem demokrasi menganut sistem ekonomi pasar. Aksioma ekonomi - politik ini menunjukkan bahwa setiap pembangunan ekonomi akan membawa implikasi demokratisasi. Masyarakat akan mempunyai peluang pendidikan, kesehatan, informasi dsb. Yang pada akhirnya menghembuskan gelombang perubahan sosial, ekonomi dan politik. Semua ini mengarah pada meningkatnya tuntutan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan-kepentingan mereka. Mereka yang merasa dirugikan oleh perubahan sosio - ekonomi dan politik pun akan menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka. Bahkan suatu keberhasilan di bidang tertentu akan melahirkan persoalan lain, paling tidak untuk jangka panjang. Reaksi atas kegagalan dan keberhasilan suatu sistem selalu menciptakan dorongan ke arah perubahan. Ini merupakan rantai sejarah dan perkembangan masyarakat.

Alasan bahwa perkembangan ekonomi bisa berhasil tanpa demokratisasi politik juga cenderung memisahkan (sebagaimana sering dilakukan pemerintah) antara demokrasi politik dan pembangunan ekonomi. Bahkan dengan alasan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, demokrasi politik boleh ditangguhkan. Banyak hal yang dapat diperdebatkan dan pandangan seperti ini. Apakah memang aspek-aspek hak asasi dan demokratisasi harus dilaksanakan secara berurutan, hak sosial ekonomi dahulu baru kemudian mengembangkan hak sipil - politik ? Pandangan ini juga sangat lemah sebab mengandung asumsi jika pembangunan ekonomi gagal maka rakyat tidak dapat melaksanakan hak-hak sipil dan politik mereka. Siapa yang menentukan bahwa tahap tertentu dan suatu pembangunan ekonomi telah tercapai dan karena itu sudah saatnya sekarang memperhatikan demokratisasi politik ? Jika hak-hak sipil politik rakyat belum dikembangkan, atas nama siapa dan bagaimana pemerintah dapat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional ?

IV. DEMOKRASI DAN HAM DALAM KONTEKS TIMUR - BARAT

Sementara itu pandangan tentang perbedaan perspektif barat dan timur dalam melihat demokratisasi dan HAM juga perlu diperdebatkan. Sebagai suatu cita-cita demokrasi bersifat universal. Meskipun ada kecenderungan egois yang dilakukan oleh negara-negara Barat dan negara-negara berkembang bahwa sistem mereka lebih baik dari sistem yang lain, demokrasi tidak mempersoalkan sistem. Ia mengatasi semua sistem dan budaya, terlepas dari perbedaan Timur - Barat.

Perbedaan Timur - Barat ini sering digunakan sebagai alasan untuk menunjukkan bahwa salah satu pihak mempunyai sistem demokrasi yang khas sambil menunjukkan betapa nilai-nilai demokrasi yang lain telah gagal membawa perbaikan kehidupan politik dan ekonomi.

Sebenarnya perbedaan Timur - Barat lebih bersifat politis yang terkait dengan sejarah penjajahan bangsa-bangsa Barat atas bangsa-bangsa Timur dan kemudian diperkuat oleh realita ketimpangan ekonomi, teknologi dan politik antara Timur dan Barat dewasa ini. Label Timur - Barat kemudian menjadi sangat situasional. Orang menjadi sadar akan hal itu dan menggunakannya saat terjadi konflik kepentingan. Label-label Barat pun diletakkan secara situasional saat mereka menyaksikan dan berhadapan dengan arogansi Barat, sehingga sekat-sekat itu seolah-olah tidak akan pernah hilang.

Membedakan demokrasi dan HAM dalam konteks Timur - Barat juga tidak mampu menjelaskan pergerakan sosial - politik. Bagi bangsa-bangsa terjajah, tertekan pemerintahan otoriter, minoritas, orang-orang yang terlempar dari sistem politik dan ekonomi, para buruh miskin, memperjuangkan demokrasi tidak ada hubungannya dengan perdebatan Barat - Timur. Hal ini pula yang dulu dirasakan oleh para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bagi mereka demokrasi dan memperjuangkan hak adalah universal dan hakiki sebagai manusia. Dan kini ketika sistem internasional terkotak-kotak dalam sistem negara yang berdaulat, masalah demokrasi dan HAM terbelenggu oleh kedaulatan nasional yang ditafsirkan secara kaku.

Demokratisasi dan HAM merupakan proses yang terus berubah. Karena itu harus di garis - bawahi bahwa tak ada titik berhenti pada demokratisasi. Ini berarti tak ada satu pun sistem yang pantas mengklaim dirinya sebagai bentuk baku sistem demokrasi, baik Barat ataupun Timur. Terlebih saat ini masyarakat berubah sangat cepat yang menuntut pembaharuan-pembaharuan. Oleh karena itu demokratisasi tidak dapat dilihat dari perspektif dikhotomi Barat dan Timur dan tidak dapat dipilah antara pembangunan ekonomi dan hak politik.

V. GAGASAN DEMOKRATISASI DAN PERMASALAHANNYA

Demokratisasi harus dilihat dari 2 unsur, politik dan sosio budaya. Secara politik, pada tingkat suprastruktur, demokrasi mengacu pada lembaga-lembaga politik yang representatif, kekuasaan negara yang terbatas dan mempunyai akuntabilitas, dapat diganti melalui sistem yang telah disepakati, penghormatan dan pelaksanaan hak-hak rakyat. Secara sosio - budaya, pada tingkat infrastruktur, demokrasi mengacu pada pluralisme masyarakat dan kebebasan untuk berserikat atau membentuk kelompok-kelompok yang interaksinya bebas dari campur tangan pemerintah. Kedua unsur ini merupakan hakekat dari apa yang disebut sebagai civil society.

Tentu dapat dipahami bahwa gagasan demokrasi dalam pengertian di atas, pada satu sisi merupakan tatanan yang ideal ; tetapi pada sisi lain hal itu masih dianggap dengan sangat hati-hati oleh kaum intelektual dan elit politik pemerintah, bahkan menimbulkan perdebatan kuat di antara mereka. Pokok masalahnya, adalah pertama, struktur masyarakat Indonesia yang plural secara etnis dan agama sehingga gagasan demokratisasi melalui pembentukan civil society dikhawatirkan akan menciptakan benih-benih perpecahan Indonesia. Kejadian di bekas Yugoslavia betapa pun sangat ekstrem, menjadi hantu yang menakutkan di Indonesia. Ini akan merusak stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi yang selama ini menjadi sumber legitimasi dan pemerintahan Orde Baru. Dalam kaitan ini perlu ditekankan, bahwa konsep kebangsaan Indonesia merupakan konsep politik, bukan konsep budaya, yang menggaris - bawahi kehendak dan komitmen politik semua elemen masyarakat

Indonesia untuk hidup bersama dalam suatu kemajemukan. Karena itu persatuan nasional Indonesia mempunyai harga sangat mahal dan penonjolan ikatan-ikatan primordial sangat membahayakan integrasi nasional Indonesia.

Masalah kedua, adalah persepsi elit politik Orde Baru tentang demokrasi dan politik secara umum banyak dipengaruhi oleh pengalaman dekade 1950-an ketika terjadi krisis-krisis parlemen akibat sistem multi partai dengan orientasi ideologi sempit, sehingga eksekutif menjadi sangat lemah, karena pengalaman sejarah yang demikian elit politik Orde Baru menjadi alergi terhadap kegiatan politik masyarakat. Ada semacam "sosialisasi" di masyarakat, bahwa politik itu kotor. Partai politik tidak leluasa mengembangkan jaringan kegiatan mereka. Ini yang dikenal dengan konsep massa mengambang (floating mass). Bersamaan dengan itu kekuasaan eksekutif menjadi sangat besar.

VI. PERLUNYA PENDIDIKAN POLITIK

Sampai tingkat tertentu dengan melihat kompleksitas masyarakat Indonesia, pendidikan yang relatif rendah, mudah digerakkan oleh isu-isu primordial, masalah tersebut dapat dimengerti. Karena itu pendidikan politik terutama mengenai penyadaran hak-hak politik rakyat dan demokrasi dalam konteks hubungan antara rakyat dan negara harus tetap dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Anehnya, oleh elit politik kedua masalah di atas, justru diletakkan dalam konteks zero sum game kekuasaan sehingga demokratisasi yang membatasi kekuasaan eksekutif dilihat sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat melalui kesadaran politik dan pluralisme, munculnya kelompok-kelompok dan partai-partai politik yang otonom terhadap intervensi pemerintah dipandang bisa mengurangi kekuasaan pemerintah. Ada semacam ketakutan luar biasa terhadap mereka yang menyarakan demokratisasi, sebagaimana terlihat dengan munculnya label-label OTB

(Organisasi Tanpa Bentuk), gerakan kiri baru (New Left), tuduhan subversif, ditunggangi pihak ketiga, dsb. Yang diterapkan dengan kriteria yang longgar dan kabur, tergantung pada situasi politik.

VII. GERAKAN PRO-DEMOKRASI

Pandangan seperti itu menutup mata terhadap substansi gerakan pro demokrasi yang sedang marak di Indonesia. Pada yang mereka perjuangkan sebenarnya adalah masalah keadilan, terutama karena ada kelompok masyarakat yang menjadi korban pembangunan ekonomi. Mereka sulit menyuarakan aspirasi politik mereka ke lembaga perwakilan rakyat (DPR dan DPRD) yang sering tidak menerima kedatangan mereka. Keadilan hukum pun terasa makin jauh karena berbagai kasus kolusi antara hukum dan kekuasaan. Mereka tidak berpikir untuk merubah bentuk dan dasar negara, mengatur kekuasaan melalui kekerasan, mengganti konstitusi dan tindakan-tindakan revolusioner lainnya. Semua itu tidak akan memperoleh dukungan luas masyarakat. Apalagi para aktivitas gerakan demokratisasi di Indonesia adalah intelijensia perkotaan yang evolusioner dan merupakan minoritas masyarakat Indonesia.

Kegagalan pemerintah dalam melihat esensi masalah ini akan melahirkan alternatif-alternatif baru bagi mereka, karena alternatif-alternatif itu kini tidak hanya tersedia di dalam negeri. Ini semua dimungkinkan karena interaksi global yang makin intensif. Di dalam interaksi global ini, ketika semua pelaku sadar akan adanya keterkaitan internasional, upaya untuk mempengaruhi penyebaran ide dan bantuan – bantuan terhadap kelompok-kelompok masyarakat di dalam negeri yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan, kerja sosial (social work) dan bentuk-bentuk hubungan yang lain. Semua ini mempunyai konsekuensi politis, terutama yang berupa penyebaran orientasi politik masyarakat dan berlanjutnya upaya-upaya demokratisasi.

VIII. PENUTUP

Oleh karena itu, perubahan akhirnya harus diterima, tidak hanya oleh Indonesia dan negara – negara berkembang yang lain, tetapi juga oleh seluruh dunia. Kedaulatan nasional hanya punya makna jika di tengah-tengah perubahan tersebut ia dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Prasetyono, "Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Indonesia", dalam "Revitalisasi Sistem Politik Indonesia". J. Soedjati Djiwandono dan T.A. Legowo, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1996.

- Yahudah, Miraky. "Democratic Politic Democratic Culture". Orbis, Vol. 37/4 (Fall 1993): 572.
- Michael Liefer, "The Challenge of Greeting, a Civil Society in Indonesia", Indonesian Quarterly, Vol. XXIII/4 (Fourth Quarter 1995) ; 355, Mirsky, "Democratic Politics" ; 571 - 574.
- Faisal Siagian, "Menangkap Peluang Demokrasi di Indonesia". Analists CSIS, Tahun XXIII, No. 1 (Januari - Februari 1994) ; 24 - 26.